

## PROPOSAL DAMAI AMERIKA SERIKAT MENGENAI PENYELESAIAN KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

Simela Victor Muhamad

### Abstrak

*Proposal damai Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah memunculkan kontroversi karena poin-poin perdamaian yang diusulkan lebih memihak Israel dan merugikan Palestina. AS di bawah kepemimpinan Presiden Trump cenderung memihak Israel, dan hal tersebut sudah terlihat sebelum proposal damai AS diumumkan. Proposal AS juga dinilai tidak menghormati hukum internasional karena mengakui permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat. Melalui tulisan ini hendak dikaji proposal damai AS tersebut dan bagaimana masyarakat internasional menyikapinya. Memerhatikan proposal AS yang lebih memihak Israel maka sudah seharusnya masyarakat internasional kembali memperkuat komitmen penyelesaian konflik Israel-Palestina. Proposal AS terkait penyelesaian konflik Israel-Palestina tidak cukup hanya dikedam, tetapi juga harus ditolak masyarakat internasional. Sebagai negara dengan konstitusi yang menolak dan memerangi penjajahan, Indonesia harus menolak proposal AS. Masyarakat internasional, termasuk Indonesia, harus mendorong dan menegaskan bahwa perdamaian yang diwujudkan, karena ini berkaitan dengan konflik di Timur Tengah, harus berlandaskan pada visi terciptanya perdamaian abadi Arab-Israel.*

### Pendahuluan

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, didampingi Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, pada 28 Januari 2020 di Gedung Putih, Washington DC, mengumumkan proposal damai Israel-Palestina dalam upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah secara komprehensif dan final. Proposal damai AS - yang disebut Trump sebagai

“Transaksi Abad Ini” - yang diumumkan pada akhir Januari 2020 menjadi salah satu berita internasional, karena menyangkut penyelesaian konflik di Timur Tengah, khususnya antara Israel dan Palestina yang hingga kini belum berhasil dicapai solusinya. Penyebutan kata “transaksi” di sini adalah sebutan sepihak AS, seolah-olah telah terjadi “kesepakatan tukar menukar wilayah” antara



Israel dan Palestina, yang sesungguhnya sangat menyedihkan dan telah menimbulkan kontroversi. Tanah Palestina tidak untuk dijual dan bisa ditukar begitu saja oleh AS untuk kepentingan Israel, demikian dikatakan Presiden Palestina Mahmoud Abbas menanggapi proposal damai AS (*theguardian.com.*, 1 Februari 2020).

Proposal damai AS memunculkan kontroversi karena poin-poin perdamaian yang diusulkan lebih memihak Israel dan merugikan Palestina. Salah satu poin kontroversial yang diusulkan AS adalah dijadikannya Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan Abu Dis sebagai ibu kota Palestina, sementara pihak Palestina dalam perjuangannya selama ini telah menetapkan Yerusalem Timur (Al-Quds), yang kini dikuasai Israel, sebagai ibu kota negara Palestina kelak (Republika, 3 Februari 2020). Proposal damai AS juga dinilai tidak menghormati hukum internasional karena mengakui permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat. Bukan tidak mungkin, pasca-proposal damai AS diumumkan Trump, konflik Israel-Palestina semakin jauh dari penyelesaian damai. Melalui tulisan ini hendak dikaji secara singkat proposal damai AS tersebut dan bagaimana seharusnya disikapi masyarakat internasional.

### Proposal Damai AS

Proposal damai Israel-Palestina yang diusulkan Presiden AS Donald Trump mencakup sejumlah hal, antara lain: 1) Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel, dan Abu Dis, kota yang berbatasan langsung dengan

Yerusalem Timur (dan berada di luar batas keamanan Israel) sebagai ibu kota Palestina; 2) Israel akan mempertahankan Lembah Yordan dan semua permukiman Yahudi di Tepi Barat; 3) Israel akan mengendalikan keamanan dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania; 4) Palestina tidak akan diakui sebagai negara independen secara langsung. Pengakuan baru akan diberikan dalam empat tahun ke depan. Dalam kerangka itu Palestina harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain berhenti mendanai kelompok yang dituding AS sebagai teroris, seperti Hamas dan kelompok jihad lainnya; 5) Pengungsi Palestina dan keturunan mereka akan diizinkan kembali masuk ke negara Palestina, namun tidak seorang pun akan diizinkan memasuki Israel (*cnbcindonesia.com.*, 29 Januari 2020).

Para pemimpin dunia dan masyarakat internasional menanggapi secara beragam proposal damai Israel-Palestina yang diajukan AS. Sebagian kalangan menyebut proposal setebal 80 halaman itu terlalu memihak Israel dan mengkhianati rakyat Palestina. Sebagian lainnya menilai proposal AS itu bisa menjadi satu langkah maju ke depan. Sebelum Liga Arab memutuskan sikap dalam pertemuan daruratnya di Kairo, Mesir, 1 Februari 2020, sejumlah negara Arab (seperti Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Qatar) mendorong Israel dan Palestina menjadikan proposal damai AS itu sebagai titik awal perundingan baru untuk mencapai solusi komprehensif (Kompas, 30 Januari 2020). Sikap sejumlah

negara Arab di atas, pada saat sidang darurat tingkat menteri luar negeri Liga Arab di Kairo, Mesir, 1 Februari 2020, setelah melalui pembahasan secara mendalam, akhirnya berubah dan mendukung keputusan Liga Arab yang secara tegas menolak proposal damai yang diusulkan AS (Kompas, 3 Februari 2020).

Sementara itu, dalam sidang Eksekutif Komite Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi, 3 Februari 2020, di mana Indonesia juga hadir, OKI menegaskan bahwa proposal damai AS itu tidak memenuhi tingkat minimal hak-hak dan aspirasi rakyat Palestina serta bertentangan dengan resolusi PBB dan hukum internasional terkait pijakan proses perdamaian (*thejakartapost.com.*, 3 Februari 2020). Keputusan sidang Liga Arab dan OKI tersebut memperkuat posisi politik Abbas dan Palestina yang sejak awal menolak proposal damai AS.

Pasca-pengumuman proposal AS, Otoritas Palestina langsung memutuskan semua hubungan dengan AS dan Israel, termasuk yang berkaitan dengan keamanan (Republika, 3 Februari 2020). Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak untuk mendiskusikan dan menerima salinan proposal damai yang ditawarkan Trump. Palestina menolak sepenuhnya rencana Trump karena tidak memenuhi sedikit pun hak dan aspirasi rakyat Palestina. Adalah wajar kalau Palestina menolak keras, karena apabila proposal damai AS diterima, berarti sebagian besar tanah historis Palestina akan

berada di bawah kedaulatan Israel. Jelas hal ini tidak adil, dan oleh karena itu, proposal damai AS soal penyelesaian konflik Israel-Palestina perlu dikritisi masyarakat internasional.

### **Sikap Masyarakat Internasional**

Sebagaimana diketahui, kebijakan AS di bawah kepemimpinan Presiden Trump terhadap isu Palestina lebih memihak Israel. Hal tersebut sudah terlihat jauh sebelum proposal damai AS diumumkan. Dalam pidatonya di Gedung Putih, 6 Desember 2017, misalnya, Presiden Trump mengemukakan bahwa AS akan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakuinya sebagai ibu kota Israel (*bbc.com.*, 7 Desember 2017). Pengakuan yang disusul pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem melanggar Resolusi Majelis Umum PBB No. 181. Bukan hanya itu, pemerintahan Trump juga tidak lagi mengakui Tepi Barat sebagai wilayah pendudukan, yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB No. 242 dan No. 338, serta tidak lagi mengakui jutaan pengungsi Palestina yang tersebar di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah, dan Lebanon (Alhadar, Republika, 4 Februari 2020).

Bagi Trump, berdasarkan proposal damai AS, apa yang disebut sebagai negara Palestina adalah negara yang tidak memiliki militer sendiri, teritori udara dan perbatasan dikontrol Israel, dan Palestina tidak boleh melakukan perjanjian dengan negara lain.

Semua itu hanya akan dilaksanakan setelah Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi. Memerhatikan proposal damai AS, yang poin-poin usulannya lebih memihak Israel dan merugikan Palestina, serta mengabaikan hukum internasional, maka tidak ada jalan lain bagi masyarakat internasional, di luar AS dan Israel, untuk kembali memperkuat komitmen penyelesaian konflik Israel-Palestina. Penyelesaian konflik berlandaskan prinsip *two state solution*, berdirinya dua negara, Israel dan Palestina, dengan batas wilayah yang diakui internasional (sesuai Resolusi DK PBB No. 242 dan No. 338) dan warganya yang hidup berdampingan secara damai, harus kembali disuarakan secara tegas di fora internasional, khususnya PBB.

Jalur diplomasi melalui PBB menjadi pilihan yang tepat saat ini ketika pintu perundingan yang disponsori masyarakat internasional belum dibuka kembali. Masyarakat internasional, tidak saja melalui forum Liga Arab dan OKI, harus membangun komitmen yang lebih kuat untuk mencari solusi damai yang adil bagi Palestina. Dalam jangka pendek ini, respons yang harus diambil adalah menyikapi proposal damai AS yang kontroversial. Terkait hal ini, mewakili aspirasi Palestina, patut diapresiasi upaya Indonesia dan Tunisia yang menggalang dukungan untuk mendorong resolusi DK PBB yang mengecam aneksasi Israel di Tepi Barat, meskipun hal itu tidak mudah karena ada kekuatan veto AS (Kompas, 6 Februari 2020). Jika AS memveto resolusi itu, Palestina

dapat membawa rancangan resolusi itu pada sidang Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara. Pemungutan suara dalam sidang Majelis Umum berlangsung secara terbuka dan akan memperlihatkan seberapa kuat respons internasional terhadap proposal damai yang diajukan Presiden Trump, sekaligus bisa memberi tekanan diplomatik terhadap AS dan Israel.

Penegasan aneksasi Israel atas Tepi Barat dalam proposal damai AS yang diajukan Presiden Trump telah menjadi kekhawatiran banyak negara. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan bahwa aneksasi Israel akan merusak usaha untuk memulai kembali pembicaraan damai di kawasan tersebut. Selain merusak proses negosiasi, tindakan sepihak Israel dengan aneksasi juga bertentangan dengan hukum internasional. Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borell menyatakan, proposal Trump menyimpang dari parameter yang disetujui internasional. Ditegaskan oleh Borell bahwa untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan, masalah status final yang belum terselesaikan harus diputuskan melalui negosiasi langsung dua pihak (Jakarta Post, 2 Februari 2020).

Penyikapan internasional atas proposal damai AS juga telah menjadi perhatian parlemen, setidaknya hal itu terlihat dari pernyataan Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, di sela-sela Konferensi Parlemen Negara-negara Anggota OKI (PUIC) di Ouagadougou, ibu kota Burkina Faso, 27-30 Januari 2020. Fadli Zon menyatakan proposal AS menjustifikasi

penjajahan Israel dan merusak masa depan pembentukan negara Palestina (jppn.com., 1 Februari 2020). Ini artinya, proposal AS semakin menegaskan keberpihakan Trump kepada Israel sekalipun harus melanggar hukum dan norma-norma internasional, terutama Resolusi DK PBB No. 2334 tahun 2016 yang mendesak Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman di tanah Palestina yang diduduki. Oleh karena itu, proposal damai AS terkait penyelesaian konflik Israel-Palestina yang diajukan Presiden Trump tidak cukup hanya dikecam, tetapi juga harus ditolak oleh masyarakat internasional.

### Penutup

Proposal damai AS secara jelas menggambarkan keberpihakan Presiden Trump kepada Israel. Sebagai negara dengan konstitusi yang menolak dan memerangi penjajahan, Indonesia harus menolak proposal damai AS. Dalam konteks untuk mencari solusi damai secara komprehensif atas konflik Israel dan Palestina, proposal damai AS tidak bisa dijadikan acuan. Masyarakat internasional, termasuk Indonesia, khususnya melalui PBB, harus mendorong dan menegaskan bahwa perdamaian yang diwujudkan, karena ini berkaitan dengan konflik di Timur Tengah, harus berlandaskan pada visi terciptanya perdamaian abadi Arab-Israel. Artinya, terciptanya perdamaian Arab-Israel yang abadi hanya mungkin terjadi apabila Palestina mendapatkan hak-hak fundamentalnya. Visi perdamaian itu harus terus didorong dan

diupayakan oleh masyarakat internasional melalui dialog secara terbuka dan adil.

### Referensi

- "Abbas Putus Kerja Sama Keamanan", *Republika*, 3 Februari 2020, hal. 7.
- "Abu Dis, Ibu Kota Palestina Versi Trump", *Republika*, 3 Februari 2020, hal. 7.
- Alhadar, Smith. "RI dan Proposal Trump", *Republika*, 4 Februari 2020, hal. 6.
- "Donald Trump: Yerusalem adalah ibu kota Israel", *bbc.com.*, 7 Desember 2017, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42251271>, diakses 2 Februari 2020.
- "EU slams Trump's Middle East peace plan", *The Jakarta Post*, 2 Februari 2020, hal. 11.
- "Fadli Zon Sebut Proposal Damai Trump Rugikan Palestina", *jppn.com.*, 1 Februari 2020, <https://www.jpnn.com/news/fadli-zon-sebut-proposal-damai-trump-rugikan-palestina>, diakses 3 Februari 2020.
- "Liga Arab Tolak Proposal AS", *Kompas*, 3 Februari 2020, hal. 8.
- "Ini Isi Proposal Damai Trump-Israel Buat Negara Palestina", *cnbcindonesia.com.*, 29 Januari 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200129124657-4-133621/ini-isi-proposal-damai-trump-israel-buat-negara-palestina/2>, diakses 2 Februari 2020.
- "OIC turns down Trump's Middle East peace plan", *thejakartapost.com.*, 3 Februari 2020, <https://>



[www.thejakartapost.com/news/2020/02/03/oic-turns-down-trumps-middle-east-peace-plan.html](http://www.thejakartapost.com/news/2020/02/03/oic-turns-down-trumps-middle-east-peace-plan.html), diakses 4 Februari 2020.

"Palestinians cut ties with Israel and US after rejecting Trump peace plan", [theguardian.com.](https://www.theguardian.com/world/2020/feb/01/palestinians-cut-ties-israel-us-trump-peace-plan), 1 Februari 2020, <https://www.theguardian.com/world/2020/feb/01/palestinians-cut-ties-israel-us-trump-peace-plan>, diakses 3 Februari 2020.

"RI Motori Resolusi DK PBB", Kompas, 6 Februari 2020, hal. 8.

"Trump Rugikan Palestina", Kompas, 30 Januari 2020, hal. 8.



Simela Victor Muhamad  
[simela.muhamad@dpr.go.id](mailto:simela.muhamad@dpr.go.id)

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si. adalah Peneliti Ahli Utama Bidang Isu-isu Politik Strategis, Masalah Internasional dan Domestik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian (Puslit BKD) DPR RI. Aktif sebagai peneliti pada Puslit BKD DPR RI, yang bertugas memberikan dukungan substansi terkait isu-isu hubungan internasional kepada Anggota DPR RI. Beberapa Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain "Kepentingan Maritim China dan Kawasan Respons Indonesia." (bagian dari buku Agenda Poros Maritim, Penerbit Azza Grafika, 2015); "Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba ke Indonesia: Masalah dan Upaya Penanganannya" (bagian dari buku Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2017); "Isu Keamanan Semenanjung Korea dan Upaya Damai Parlemen." (artikel di Jurnal Politica Vol 7 No. 1, Mei 2016) dan "Peran Asian Parliamentary Assembly dalam Mendukung Solusi Damai Palestina-Israel" (artikel di Jurnal Politica, Vol. 8 No. 1, Mei 2017).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.